



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

15 Mei 2018

Nomor : B. 6621 / DJPT / P1. 210. D3 / V / 2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/PER-DJPT/2017 menjadi Peraturan Nomor 1/PER-DJPT/2018 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Solar (*Gas Oil*) Untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam**

Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

(Daftar Terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dengan ini kami sampaikan telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2018 yang berlaku mulai 9 April 2018 (petunjuk pelaksanaan dapat diunduh pada link berikut <https://bit.ly/2jJkRII>).

Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pengajuan usulan baik pembangunan dan atau pengelolaan SPDN agar sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan yang baru ini, dan kami mohon bantuan Saudara untuk dapat mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan dimaksud kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, UPT Daerah Pelabuhan Perikanan dan Stakeholder lainnya di wilayah kerja Saudara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Pelabuhan Perikanan

Erts P. Lesnussa

Tembusan:

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran 1. Daftar Undangan

Nomor Surat : B.6621/DJPT/Pl.210.D3/V/2018

Yth.

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DI. Yogyakarta
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
19. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
21. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara
22. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat
23. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
25. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua
27. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat
28. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
29. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku
30. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara
31. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
32. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo
33. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Riau
34. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

